

WIJEN POPULER

WIDYAISWARA JAWA TIMUR ECOLearning

INSPIRASI PENGETAHUAN UNTUK ASN YANG LEBIH BAIK

*Belajar
Beradaptasi
Berkarya
untuk
Pelayanan Publik
yang Lebih Baik*

EDISI
KHUSUS

ARTIKEL
POPULER

PENGETAHUAN
INSPIRASI
PRAKTIK BAIK



TEKNOLOGI
BARU



KOMPETENSI
ASN



PELUANG
DAN TANTANGAN



ETIKA DAN
KEAMANAN DATA



KOLABORASI
MANUSIA DAN AI

*Teknologi adalah
alat, manusia
tetap penentu.*

ASN dan AI: Apakah Kita Akan Digantikan oleh Mesin?

Teknologi terus berkembang.
Namun, apakah itu berarti
ASN akan digantikan?
**Mari kita lihat
lebih jernih.**



*Bersama AI
Menuju Pelayanan Publik
yang Lebih Baik*

Oleh:
Biasworo Adisuyanto Aka
Widyaiswara Ahli Utama
BPSDM Provinsi Jawa Timur



PENGETAHUAN



KOLABORASI



INOVASI



DAMPAK NYATA

ASN dan AI: Apakah Kita Akan Digantikan oleh Mesin?

Artikel Populer / WIDYA POPULER

Oleh:

Biasworo Adisuyanto Aka

Bayangkan seorang ASN memulai pagi dengan pekerjaan yang dulu membutuhkan waktu berjam-jam: membaca banyak dokumen, membuat ringkasan, menyiapkan bahan rapat, menyusun konsep naskah, atau mengolah informasi. Kini, sebagian pekerjaan itu dapat dibantu oleh Artificial Intelligence (AI).

Perubahan ini menghadirkan satu pertanyaan yang semakin sering muncul: jika mesin semakin mampu membaca, menulis, menganalisis, dan menghasilkan berbagai keluaran, apakah suatu saat ASN akan digantikan?

Pertanyaan yang lebih penting mungkin bukan “apakah AI menggantikan ASN?”, melainkan “bagian mana dari pekerjaan ASN yang dapat dibantu AI, dan bagian mana yang tetap membutuhkan manusia?”

AI Bukan Lagi Cerita Masa Depan

AI telah menjadi bagian dari perkembangan transformasi digital. Pemerintah Indonesia sendiri sedang memperkuat tata kelola AI. Pada 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan Peta Jalan AI Nasional 2026–2029 serta regulasi mengenai etika AI. Dalam pembahasannya, AI ditempatkan sebagai teknologi yang perlu dikembangkan secara etis, aman, inklusif, dan bertanggung jawab.

[🔗cite🔗turn0search1🔗turn0search11🔗](#)

Bagi ASN, perkembangan ini penting karena pekerjaan pemerintahan sangat dekat dengan data, informasi, dokumen, pelayanan, analisis, dan pengambilan keputusan. AI berpotensi membantu mempercepat sebagian pekerjaan tersebut. Namun, kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pelayanan publik.

Yang Berubah Adalah Cara Kerja

Dalam pandangan saya, pertanyaan tentang AI sering terlalu cepat diarahkan pada hilangnya pekerjaan. Padahal, teknologi juga dapat mengubah cara sebuah pekerjaan dilakukan.

Bayangkan AI membantu membuat ringkasan rapat. ASN tidak perlu lagi menghabiskan seluruh waktunya untuk pekerjaan mekanis tersebut. Waktu yang tersedia dapat digunakan untuk memeriksa substansi, mengklarifikasi persoalan, berdiskusi dengan tim, atau menindaklanjuti keputusan.

Artinya, nilai ASN justru dapat bergeser dari sekadar mengolah informasi menuju kemampuan memahami konteks, menilai pilihan, berkoordinasi, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Tetapi AI Tidak Selalu Benar

Di sinilah kita perlu berhati-hati. Jawaban AI dapat terlihat sangat meyakinkan, tetapi tetap harus diperiksa. AI dapat menghasilkan informasi yang keliru, tidak lengkap, atau tidak sesuai konteks.

Karena itu, menggunakan AI bukan berarti menyerahkan proses berpikir kepada mesin. ASN tetap perlu melakukan verifikasi terhadap fakta, sumber, regulasi, data, dan konteks sebelum hasil AI digunakan dalam pekerjaan.

AI dapat membantu menghasilkan jawaban. ASN tetap bertanggung jawab atas keputusan dan penggunaannya.

Data Pemerintah: Jangan Sembarangan Dimasukkan

Penggunaan AI juga membawa persoalan keamanan informasi. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial menekankan antara lain aspek inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, serta perlindungan privasi dan data pribadi. [\[cite?turn0search6?turn0search9\]](#)

Bagi ASN, prinsip sederhananya adalah: tidak semua informasi kantor boleh dimasukkan ke layanan AI publik. Sebelum memasukkan dokumen atau data, pahami terlebih dahulu klasifikasi, kerahasiaan, hak akses, dan aturan yang berlaku.

Pemerintah pada 2026 juga menekankan bahwa tata kelola AI diperlukan untuk memitigasi risiko seperti disinformasi, kebocoran data, dan ancaman keamanan siber. [\[cite?turn0search10\]](#)

Yang Tidak Boleh Hilang: Human Judgment

Bayangkan sebuah AI memberikan tiga alternatif untuk meningkatkan pelayanan publik. Apakah ASN cukup memilih salah satunya? Tidak.

ASN perlu mempertanyakan: apakah datanya benar? Apakah alternatif tersebut sesuai regulasi? Bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Apakah ada kelompok yang mungkin dirugikan? Siapa yang bertanggung jawab jika keputusan tersebut keliru?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan human judgment—kemampuan manusia memahami konteks, nilai, kepentingan, risiko, dan konsekuensi.

Kementerian Komunikasi dan Digital pada 2026 juga menekankan pentingnya tata kelola ketika AI semakin mampu merencanakan, mengambil keputusan, dan mengeksekusi tindakan, agar pemanfaatannya tetap akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. [\[cite?turn0search4\]](#)

Lima Kompetensi yang Perlu Dibangun ASN

1. Literasi AI — memahami kemampuan, keterbatasan, dan risiko AI.

2. Kemampuan memberi instruksi — mampu menjelaskan tujuan, konteks, batasan, dan bentuk keluaran yang dibutuhkan.
3. Berpikir kritis — tidak menerima jawaban AI tanpa pemeriksaan.
4. Literasi data dan informasi — mampu membaca, menilai, dan menggunakan data secara tepat.
5. Etika dan keamanan digital — memahami privasi, kerahasiaan, hak cipta, akuntabilitas, serta penggunaan AI yang bertanggung jawab.

Mulai dari Pekerjaan Kecil

Tidak perlu menunggu sampai menjadi ahli AI untuk mulai belajar. ASN dapat memulai dari pekerjaan berisiko rendah: meminta AI merangkum dokumen yang tidak bersifat rahasia, menyusun kerangka presentasi, membuat daftar ide, membantu memperbaiki struktur tulisan, atau membuat pertanyaan untuk diskusi.

Setelah itu, lakukan satu kebiasaan penting: periksa kembali hasilnya.

Gunakan AI untuk mempercepat pekerjaan, bukan untuk menghilangkan tanggung jawab.

Dari Takut Digantikan Menjadi Siap Berkolaborasi

Menurut saya, ASN tidak perlu melihat perkembangan AI sebagai perlombaan manusia melawan mesin. Yang lebih penting adalah membangun pola kerja baru: manusia menentukan tujuan, AI membantu proses, manusia memeriksa hasil, dan manusia tetap bertanggung jawab.

Dengan pola tersebut, AI dapat menjadi asisten digital yang membantu ASN mengurangi pekerjaan rutin dan menyediakan lebih banyak waktu untuk pekerjaan yang membutuhkan komunikasi, empati, kreativitas, koordinasi, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan.

WIDYA INSIGHT

AI mungkin dapat menghasilkan teks dalam hitungan detik. Tetapi kualitas pelayanan publik tetap ditentukan oleh bagaimana manusia menggunakan, memeriksa, dan mempertanggungjawabkan hasilnya.

Jadi, pertanyaan kita tidak harus berhenti pada: “Apakah saya akan digantikan AI?” Pertanyaan yang lebih produktif adalah: “Pekerjaan apa yang dapat saya lakukan lebih baik dengan bantuan AI, dan kompetensi manusia apa yang harus saya perkuat?”

Penutup: Masa Depan ASN Bukan Tanpa Manusia

AI akan terus berkembang. Cara kita bekerja kemungkinan juga akan berubah. Sebagian pekerjaan rutin dapat semakin banyak dibantu teknologi. Namun pemerintahan tetap

berhadapan dengan manusia, masyarakat, nilai, aturan, kepentingan, dan keputusan yang memiliki konsekuensi.

Karena itu, tantangan ASN bukan sekadar belajar menggunakan AI. Tantangannya adalah menjadi ASN yang mampu menggunakan AI tanpa kehilangan nalar kritis, etika, tanggung jawab, dan orientasi pelayanan.

Bukan AI yang harus ditakuti. Yang perlu dihindari adalah berhenti belajar ketika dunia kerja terus berubah.

Pada akhirnya, AI dapat menjadi alat yang sangat kuat. Tetapi alat tetap membutuhkan manusia yang tahu kapan menggunakannya, bagaimana menggunakannya, dan untuk tujuan apa.

Dan mungkin, di situlah jawaban atas pertanyaan kita berada: bukan manusia atau mesin, melainkan manusia yang mampu bekerja bersama mesin—dengan tetap menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan.

Referensi Pilihan

Kementerian Komunikasi dan Digital. 2026. Informasi dan siaran pers mengenai Peta Jalan AI Nasional 2026–2029 serta tata kelola dan etika AI.

Kementerian Komunikasi dan Digital/JDIH. 2023. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Kementerian Komunikasi dan Digital. 2026. Siaran pers mengenai penguatan tata kelola AI, keamanan data, dan akuntabilitas pemanfaatan AI.